

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**

Fidri¹, Erwin Wahyudi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova
dhirezalkian@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Konsep Strategi dan Manajemen Strategi kemudian menjadi landasan teori guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana strategi serta faktor apa saja yang mempengaruhi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih mencakup: (a) dimensi internal melalui sosialisasi, (b) penggunaan sumber-sumber (penguatan kelembagaan, kerjasama antara komisioner KPU dengan sekretariat KPU), (c) pemanfaatan sumber daya teknologi, (pemanfaatan sumber-sumber informasi daring maupun massa. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih, yakni: (a) tingkat pendidikan masyarakat, (b) hambatan akan aktivitas sehari-hari, (c) tekanan dari pihak keluarga.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Strategi, Manajemen Strategi, Kabupaten Sumbawa Barat

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi atau KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan sedangkan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten atau Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Pemilu diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta yang tidak kalah penting independen. Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Pemilu merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk membuka lembaran

baru demokrasi Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia, selain itu bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota kepada masyarakat”.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Disisi lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.

Keterlibatan masyarakat dalam pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi karna merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi yaitu pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan

kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu dan dapat dilihat dari surat-suara yang tidak terpakai dalam setiap pemilihan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam tiga periode terakhir penyelenggaraan pemilihan umum selalu di bawah 85% untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini:

Tabel Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat

No	Tahun	Tingkat Partisipasi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2010	83.07 %	78.54%	80.78%
2.	2015	79.76%	77.04%	78.36%
3.	2020	79.35%	83.15%	81.31%

Sumber data: KPU Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas tingkat persentase partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 80,78%. Namun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 78,36% sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 kembali terjadi peningkatan partisipasi sebesar 81,31%.

Peningkatan partisipasi yang terjadi di tahun 2020 memiliki cerita yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang telah digelar serentak pada Rabu (9/12/2020) dari 270 Pilkada yang digelar 25 Kabupaten/Kota dipastikan hanya memiliki satu pasangan yang melawan kotak Kosong salah satunya pemilihan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat dimana ada sekitar 93.571 orang pemilih di Kabupaten ini, dimana sebanyak 45.477 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48.094 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan tingkat partisipasinya mencapai 81.31% Dimana Pilkada ke empat kali yang baru dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat ini hanya terdiri dari satu pasang calon yang merupakan Incumbent yakni W.Musyafirin beserta wakilnya Fud Syaifuddin melawan kotak kosong.

Ini berbeda dengan pilkada tahun lalu yang terdiri dari tiga pasangan calon bila dilihat kebelakang KPU telah berupaya sangat maksimal dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Tercatat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Sumbawa Barat hanya mencapai 78.36%, yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 21.64% dan total partisipasi pemilih sebanyak 92.606 orang.

Hal ini sesuai dengan tugas dan peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi jika di bandingkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun lalu menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencari strategi yang taktis untuk menjangkau pemilih. Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menandakan Komisi Pemilihan Umum sudah mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat.

Dari uraian latar belakang ini, Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah mengenai: (1) bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan konsep Strategi dan Manajemen Strategi sebagai landasan teori guna menjawab rumusan masalah.

Strategi

Menurut Muldjono (2012:15) strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian misi. Secara eksplisit strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Muldjono (2012: 15) strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perangmaupun damai. Menurut

Ruslan dalam Haryono, dkk (2016:206) strategi adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dan praktek operasionalnya. Menurut Firmanzah (2008: 244) Strategi merupakan cara, metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan pemimpin tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil. Tujuannya adalah memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang/jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran organisasi. Manajemen strategis (*strategic management*) dapat berbentuk seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi perusahaan dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi. (Muldjono, 2012: 18).

Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi dimaksud adalah (Taufiqurokhman, 2016:49-51):

a. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan

Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif mengenal manajemen strategik terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih masa depan. Visi dapat diartikan sebagai 'kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi pada masa depan'. Sehubungan dengan hal di atas Lonnie Helgerson yang dikutip Salusu menyatakan bahwa visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dibuat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap

orang untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak (pucuk pimpinan) organisasi.

b. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi internal adalah kondisi organisasi nonprofit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan renstra yang berjangka panjang. Analisis terhadap lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan nasional dan lingkungan global (internal), yang mencakup berbagai aspek atau kondisi, seperti kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, agama dan lain-lain.

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-sumber

Sumber daya terdiri dari sumber daya material khususnya berupa sarana dan prasarana, sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program dan proyek, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya informasi.

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Manajemen strategi yang dimulai dengan menyusun rencana strategi merupakan pengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan, baik pada organisasi yang bersifat privat maupun publik. Rencana strategi harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya dimasa depan merupakan wewenang dan tanggungjawab manajemen puncak, karena seluruh kegiatan merealisasikannya merupakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan tertinggi, meskipun kegiatannya dilimpahkan pada organisasi atau satuan unit kerja yang relevan.

e. Dimensi Multi Bidang

Setiap organisasi/perusahaan untuk mengeksplorasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Ini berarti organisasi (bisnis maupun publik) berusaha untuk mengurangi kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian pengertian ini menunjuk pula untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana strategi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih studi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2011: 20).

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan dan tulisan di lapangan. Jadi, data yang diperoleh dari lapangan akan dipilah-pilah dengan cara mengambil yang diperlukan dan mengabaikan yang tidak diperlukan.

Penyajian data, dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara mendalam dan keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Verifikasi, peneliti mencoba mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan melakukan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi penelitian selama proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi KPU Sumbawa Barat Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

1. Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara seperti tatap muka, online, dan media cetak meskipun KPU harus bekerja di masa pandemic Covid-19 bencana non-alam sedikit terganggu dalam pelaksanaan sosialisasi tatap muka karena tidak bisa maksimal seperti sosialisasi penyelenggaraan pemilihan-pemilihan pada periode yang lalu. Namun sosialisasi tatap muka tetap dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta dengan membatasi jumlah peserta sosialisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Cara lain juga dilakukan KPU atau strategi lain KPU dalam melakukan sosialisasi ditingkat masyarakat sarannya pemilih pemula, disabilitas, dan komunitas sehingga

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bisa terpublikasi atau terkonfirmasi kepada masyarakat, Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan KPU sangat terbatas karena pandemi covid 19 sebagaimana aturan yang telah ditetapkan.

Disamping tatap muka KPU Kabupaten Sumbawa Barat juga melakukan sosialisasi melalui media online sebagai alternatif lain dalam memaksimalkan sosialisasi dimasa pandemi covid 19 agar dapat menjangkau lini lain yang menjadi sasaran KPU dalam meningkatkan partisipasi dimana dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap media sosial sehingga KPU menjadikan salah satu cara untuk melakukan sosialisasi seperti melalui facebook, instagram, twitter, youtube, dan web.

“KPU tetap berupaya secara maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan, banyak cara yang dilakukan disamping tatap muka meski ada keterbatasan yang diberikan oleh aturan di masa pandemi Covid-19, seperti batasan jumlah yang akan diundang kemuadlan materi singkat berupa materi inti KPU juga sosialisasi melalui media online dan bekerja sama dengan media cetak yang ada diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat” (pernyataan Herman Jayadi, anggota komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat)

Bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Proses Kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa Barat

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
A	Sosialisasi Tatap Muka	
1.	Siswa /i MAN 1 Taliwang	Pemilih Pemula
2.	Vscobar dan Kopi Kebun	Pemilih Pemula
3.	Kerja sama dengan lembaga K3P	Masarakat umum
4.	Car Free Day Komplek KTC (Kemutar Telu Center)	Masyarakat umum
B	Sosialisasi Online	
1.	Live Streaming	Masyarakat umum

Sumber Data KPU Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

2. Pendayagunaan Sumber-Sumber

a. Penguatan Kelembagaan

Dari keberhasilan yang di raih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat selaku penyelenggara pemilihan tidak terlepas dari peran masing-masing baik itu Anggota Komisi KPU, Sekretariat KPU maupun peran dari badan *Adhock* seperti PPK dan KPPS, Penguatan kelembagaan dilakukan guna untuk menyatukan atau menyamakan persepsi untuk Memastikan adanya transformasi pengetahuan terhadap sesama badan *adhock* agar terjalin kerja sama yang baik dimasing-masing jajaran sama sesuai dengan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pemilihan, seperti yang disampaikan oleh ketua komisioner KPU, Deni Saputra menuturkan:

*“KPU tidak bisa bekerja sendiri, segala kebijakan, rumusan, keputusan atau apapun yang dihasilkan KPU tentu tidak bisa dieksekusi sepenuhnya oleh KPU disitulah peran penting baik dari sekretariat sebagai pelaksana teknis maupun peran dari badan *adhoc* mereka adalah merupakan perpanjangan tangan dari KPU dimana keberadaan mereka baik PPK maupun PPS itu justru mempunyai peran yang sangat penting karena peran vital berupa sosialisasi itu berada di PPK dan PPS yang kesehariannya berbaur dengan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa “(wawancara tanggal 5 juli 2021)*

Anggota PPK maupun KPPS harus mendapatkan pembekalan atau biasa disebut pelatihan atau bimbingan teknis karna salah satu faktor dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan pekerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja (Yuniarsih, 2008:134). Menurut Nitisemito (dalam Yuniarsih, 2008:135), bahwa tujuan dari pelatihan adalah pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik, tanggung jawab diharapkan lebih besar, dan kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang.

Jadi di dalam proses penyelenggaraan pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat memberikan Bimbingan Teknis Kepada penyelenggara

Pemilihan dari Tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara secara berjenjang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti Bimbingan Teknis diantaranya terdapat pada tabel dibawah ini;

Tabel Bimbingan Tekhnis KPU Sumbawa Barat

NO.	KEGIATAN	SASARAN
1.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	KPU Kabupaten Sumbawa Barat
2.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)	KPU, Kecamatan, Desa dan TPS.
3.	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), TPS/KPPS
4.	Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS /KPPS

Sumber data KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Kerjasama Komisioner dengan secretariat

KPU Kabupaten Sumbawa Barat umumnya baik Komisioner maupun Sekertariat telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing tetapi tujuan bersama adalah menyelenggarakan pemilu. seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Herman Jayadi,S.AP selaku komisioner KPU di kantornya dan mejelaskan bahwa: *“Ketika pelaksanaan pemilihan itu maka komisioner KPU dengan Sekertariat KPU bekerja sama melebur menjadi satu untuk mensukseskan pemilihan jadi ada kolaborasi yang kental yang kami lakukan bersama”* (Herman Jayadi, komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat).

c. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah koordinasi antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan jajaran dibawahnya karna teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memper-lihatkan

bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini seperti penggunaan aplikasi SIDALI merupakan system elektronik dan teknologi informasi yang digunakan KPU untuk proses kerja penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data terdapat juga aplikasi SIFOL yaitu system informasi partai politik selain dari aplikasi SIREKAP dan SILON. *“kalau sekarang ini kita bekerja ya semuanya dengan teknologi ada sistem informasi pemilu, SIDALIH, ada SIFOL itu adalah teknologi-teknologi yang digunakan oleh KPU untuk mempermudah KPU secara Nasional dalam penyelenggaraan pemilihan “* (Herman Jayadi, komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan yang tinggi sangat berpengaruh dalam memberikan informasi-informasi tentang politik dan persoalan tentang politik, serta bisa mengembangkan sebuah kecakapan dalam menganalisa dan menciptakan minat serta kemampuan berpolitik. Bahwa apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat juga akan tinggi begitupula sebaliknya. Namun, di Kabupaten Sumbawa Barat masih terdapat orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau bahkan yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Seperti data table dibawah ini.

Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/ Tidak tamat SD	26.102	25.268	51.370
2.	SD/ SMP/ SMA	39.664	41.045	80.709
3.	D-1, D-2, D-3, S-1, S2, dan S-3	4.254	4.743	8.997
JUMLAH		70.020	71.056	141.076

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KSB (2019)

Dari data diatas bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak khususnya masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat terlihat dari table 4.1 di atas adalah gambaran pendidikan sekolah dasar (SD)/ tidak sekolah cukup rendah jumlahnya yaitu 51.370 jiwa sedangkan dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 80.709 jiwa dan dari tingkat diploma 1(D-1) sampai dengan strata 3 (S-3) berjumlah 8.997 jiwa pendidikan masyarakat terbilang rendah menjadi salah satu factor tingkat rendahnya partisipasi karna masih terdapat masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan memiliki kesadaran yang rendah untuk hak dan kewajiban kewarganegaraannya karna tingkat pendidikan sangat berpengaruh kepada tingkat partisipasi masarakat dalam pemilihan langsung.

b. Kegiatan Sehari-Hari

Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik dan kesukarelaan politik warga negara, karena semakin warga negara sadar bahwa dirinya diperintah, maka warga negara kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam mempengaruhi tingkat pertisipasi masyarakat yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).namun ada hal lain yang bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan secara langsung seperti kesibukan sehari-hari atau pekerjaan yang dimiliki hal ini menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan politik yang menyita waktu tuntutan pekerjaan sebagai pekerja menjadi alasan utama untuk tidak melakukan pemilihan secara langsung karna tanggungjawab yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga yang menjadi factor utama untuk memilih tidah terlibat dalam proses pemilihan secara langsung. Seperti dijelaskan oleh Azis wibowo seorang pekerja tambang warga desa Tongo kecamatan Sekongkang menjelaskan bahwa: *“kami diijinkan untuk memilih, dengan catatan langsung off (cuti) dan harus menunggu jadwal masuk berikutnya*

untuk bisa kembali bekerja jadi saya memutuskan untuk tidak turun untuk mencoblos (memilih)". Tidak jauh beda dengan M. Nur Faizin pekerja tambang salah satu warga kelurahan Telaga Bertong kecamatan Taliwang menyampaikan bahwa: "saya tidak ingin mendapat potongan gaji jika saya turun untuk menyoblos (memilih) dikarenakan kebutuhan yang sudah menyesuaikan seperti bulan-bulan yang lalu untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain".

Kendala yang dimiliki oleh para pekerja tambang ialah tidak diberi kelonggaran waktu dan keringanan kerja sehingga mengakibatkan para pekerja untuk memilih antara tetap bekerja atau turun untuk melakukan pemilihan secara langsung dengan catatan hari kerja berkurang yang akan berdampak pada pendapatan bulanan.

c. Pengaruh keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang memiliki kedudukan paling sentral di antara agen-agen lainnya dikarenakan, keluarga merupakan institusi pertama yang ditemui oleh setiap individu dalam kehidupannya. Pada keluarga jugalah individu belajar berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini orang tua adalah orang yang paling berperan penting. Interaksi yang terjadi hampir setiap hari antara individu dan orang tua membuat individu mulai mengenal tentang pola hubungan kekuasaan.

Dimulai dari pola hubungan kekuasaan dalam keluarga nantinya individu akan mulai terpengaruhi persepsinya mengenai pola hubungan kekuasaan dalam konteks yang lebih luas, seperti pada sistem politik. Baik disengaja atau tidak, segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua) akan diserap dan disimpan dalam ingatan individu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, semakin seringnya interaksi yang terjalin antara individu dan keluarga maka secara tidak sadar hal tersebut akan mempengaruhi individu dalam cara pandanganya terhadap sistem politik, reaksinya kepada isu-isu politik yang sedang terjadi, serta bagaimana ia menentukan sikapnya dalam politik. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan sosialisasi politik dalam keluarga yang nantinya juga ikut mempengaruhi perilaku politik seorang individu tentunya akan sangat terpengaruhi oleh tingkat intensitas komunikasi yang terjadi antara individu dan keluarga.

Karena poin penting dari terjadinya proses sosialisasi dalam keluarga adalah dapat mempengaruhi tindak-tanduk perilaku politik anak setelah menginjak dewasa.

Namun terdapat juga orang tua yang melarang anaknya untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan secara langsung dengan alasan masing-masing seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada Siti Rayatul Mahabbah salah satu mahasiswi warga kelurahan Telaga Bertong menjelaskan bahwa: *“Saya tidak ikut memilih karna ibu saya melarang saya pulang sebab terkendala dengan biaya untuk pulang dan kebal lagi diwaktu yang hampir bersamaan karna saya harus kembali mengikuti proses kegiatan belajar mengajar”*

Sebagian orang tua masih berpikir agar anaknya hanya fokus untuk belajar dikarenakan orang tua beranggapan anaknya masih belum paham dengan dunia politik yang baik buruknya akan berdampak pada periode yang akan berlangsung, sehingga cenderung untuk menyuruh anaknya untuk fokus pada sekolah dan belajar.

KESIMPULAN

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Dimensi internal yaitu sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media *online* dan sosialisasi melalui media cetak.
2. Penggunaan sumber-sumber dimiliki untuk pengutan kelembagaan, kerjasama antara Komisioner KPU dengan Sekertariat KPU, pemanfaatan sumber daya teknologi, pemanfaatan sumber-sumber informasi baik dari media daring dan media massa.
3. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat adalah tingkat pendidikan Masyarakat, rendahnya partisipasi Masyarakat, larangan dari pihak keluarga

REFERENSI

- Andila, R.Y. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka Golput (studi pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2015). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Andriyus, S.Sos., M.Si. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

- masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2009 di kecamatan Sengingi Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi dalam Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan. JKP Volume 2 Nomor 2 September 2013.
- Arifin, A. 2013. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Arikunto, S. 1999. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfar, M. 2006. Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Cholisin, dan Nasiwan. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak.
- Firmansyah, R dan Harmanto. 2015. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2013 kota Mojokerto dalam Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 1 nomor 4 tahun 2015.
- Firmanzah, 2008. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gleko, Petrus dan Agung S. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442- 6962 Vol. 6 No. 1 (2017).
- Haryono, D, dkk. 2016. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2015 dalam eJournal Administrative Reform, ISSN 2338-7637, Volume 4, Nomor 2.
- Hendrik, D. 2010. Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008 dalam Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 2.
- Huntington P, S. 1991. Gelombang Demokrasi Ketiga. Jakarta: Grafiti.
- Husein, H. 2014. Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding. Jakarta: Perludem.
- Jurdi, F. 2014. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat. 1982. Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.
- Mariana, D dan Caroline P. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Marwiyah, S. 2016. Golput dalam pemilukada serentak dalam Jurnal Etika & Pemilu: Evaluasi & Proyek Pemilu Demokratis. Vol. 2, Nomor 4. ISSN 2460-0911.
- Miles, B.M dan Huberman, A.M. 2011. Analisa Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muldjono, D. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhasim, Moch. 2016. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi penajakan dalam jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. ISBN: 9789793384832 LIPI-16015 4 Oktober 2016.
- Nursal, A. 2004. Political Marketing (Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pearce, R. 1997. Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Prasetyoningsih, N. 2014. Dampak pemilihan umum serentak bagi pembangunan demokrasi indonesia dalam Jurnal Media Hukum. Volume 21.
- Rahman HI, A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta. Reynolds, A dkk. 2005. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA. Jakarta: Perludem.
- Rizkiyansyah, FK. 2007. Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer.
- Rozitra, D. 2017. Evaluasi implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam pemutakhiran data pemilih (studi pada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sastroatmodjo, S. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sendhikasari, D.D. Partisipasi Pemilih menjelang pemilu 2014 dalam Jurnal

Info

Singkat Pemerintahan dalam Negeri Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013.

Sinaga, R.S. 2012. Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir dalam Dimensi Arts, Praxis, & Policy. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Singarimbun, M dan Sofyan E. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES

Sitepu, A.P. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soebagio, H. 2008. Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 12, No. 2, Desember.

Soedarsono. 2005. Mahkamah Konstitusi Pegawai Demokrasi. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung:

Elfabeta Suharizal. 2011. Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan konsep mendatang. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Taufiqurokhman. 2016. Manajemen Strategik. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik. Jakarta: Binarupa Aksara

Whelen, Thomas L dan J. David Hunger. 2012. Strategic Management and Business Policy. USA: Pearson Education Inc.

Zaman, Rambe Kamarul. 2016. Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Jakarta: PT. Mizan Publika.

Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon.

<http://www.rumahpemilu.com/public/doc/Rekomendasi%20Workshop-Mendorong%20Partisipasi%20Masyarakat%20dalam%20Pemilu%202014%20-%20Edited.pdf> (diakses tanggal 20 Januari 2018)

<https://nasional.tempo.co/read/1040265/target-jumlah-pemilih-naik-kpu-usahakan-ini-untuk-pilkada-2018> (diakses tanggal 19 Januari 2018)